

MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN SIMANTRI UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI DI BALI

NYOMAN PARINING

Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana

ABSTRAK

Makalah yang berjudul “Modal Sosial Dalam Pengembangan Simantri Untuk Pemberdayaan Petani Di Bali” penulisannya berdasarkan penelitian pada pendamping simantri dan studi komparasi dari kepustakaan yang dirangkum dari beberapa jurnal tentang modal social, pemberdayaan masyarakat, peranan modal social dalam pemberdayaan masyarakat, produk pertanian berkelanjutan yang merupakan hasil dari petani kelompok simantri. Hasil penelitian dan studi komparasi mendapatkan bahwa modal social terutama kerjasama, jaringan dan nilai-nilai yang sangat bermanfaat dalam pemberdayaan petani terutama memperluas jaringan, kerjasama dan peningkatan kualitas manusia seperti peningkatan pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan. Pemerintah Bali agar menambah kelompok yang tergabung dalam kelompok simantri sehingga pembagiannya secara merata dan tidak memunculkan kecemburuan social.

Kata kunci: modal sosial, pemberdayaan masyarakat simantri, pertanian berkelanjutan

ABSTRACT

The paper entitled “Social Capital in Development Simantri to Farmer Empowerment In Bali” writing based on research with respondent of change agent of simantri and a comparative study of literature is summarized from a number of journals on social capital, community empowerment, the role of social capital in community empowerment, sustainable agricultural products that are results of farmer groups simantri. The results and comparative studies find that social capital, especially cooperation, networks and values that are very useful in the empowerment of farmers, especially of networking, cooperation and enhancement of human qualities such as increased knowledge about sustainable agriculture. The government of Bali to add the number of the group so that its distribution of simantri evenly and not create social jealousy.

Keywords: social capital, community empowerment simantri, sustainable agriculture

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Petani dengan lahan sempit biasanya hidup miskin di pedesaan. Kemampuan teknologi yang rendah dan sumber daya manusia yang tidak memadai, kemiskinan menjadi masalah pembangunan. Angka kemiskinan di Indonesia pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009 (14,15 persen), dan diperkirakan hingga akhir tahun 2010 jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 31,02 juta jiwa (13,3 persen) dan 19,93 juta jiwa atau 64,2 persen di antaranya tinggal di pedesaan (Badan Pusat Statistik, dalam Anonim, 2010). Pemerintah memperhitungkan bahwa pencapaiannya 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap kesempatan kerja sebesar 400.000 orang. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, diperkirakan pada tahun 2011 akan tercipta sekitar 2,5 juta kesempatan kerja baru

World Bank Report 2006 menekankan jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan salah satunya adalah peningkatan produktivitas pertanian. Hal ini bisa terjadi akibat peningkatan produktivitas pada pertanian berskala kecil atau akibat pergeseran ke arah pertanian komersial. Peningkatan produktivitas pertanian sebagai hasil revolusi hijau merupakan salah satu pemicu utama pertumbuhan selama tiga dasawarsa yang bermula pada tahun 1970 an. Dewasa ini, harga komoditas dunia yang tinggi telah menopang pertumbuhan output, sedangkan pergeseran tenaga kerja keluar dari sektor pertanian telah menjaga pertumbuhan produktivitas kerja di bidang pertanian. Akibatnya, diagnosa kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan di sektor pertanian tetap menjadi pendorong utama untuk pengurangan kemiskinan. Data panel antara

tahun 1993 dan 2000 menunjukkan bahwa 40 persen pekerja pertanian di daerah pedesaan mampu keluar dari jeratan kemiskinan dengan tetap bekerja di sektor pertanian pedesaan.

Hampir dua pertiga kepala keluarga miskin masih bekerja di sektor pertanian, memacu kemampuan sektor pertanian tetap mutlak bagi upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh. Analisis menunjukkan bahwa rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian informal cenderung miskin. Akan tetapi pertanian di Indonesia tidak berkembang dengan baik. Kendati produktivitas kerja tetap meningkat akibat arus tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian, namun pertumbuhan produktivitas faktor total (*total factor productivity*) sektor pertanian ternyata negatif sejak awal tahun 1990an, dari pertumbuhan positif per tahun sebesar 2,5 persen pada periode 1968-1992 menjadi kontraksi per tahun sebesar 0,1 persen dari tahun 1993 sampai tahun 2000 (BPS, 2002 dalam Anonim, 2006). Upaya-upaya untuk memperbaiki produktivitas pertanian tersebut hendaknya juga mencakup pembangunan sistem pemasaran dan informasi yang lebih baik untuk unit usaha di pedesaan.

Menurut BPS tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2010 hanya 4,88 persen menurun 0,25 persen dibandingkan kondisi Maret 2009 yang mencapai 5,13 persen. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2010 mencapai 174,93 ribu orang, dengan komposisi 83,62 ribu orang di daerah perkotaan dan 91,31 ribu orang di daerah pedesaan. Angka kemiskinan di Bali dari Tahun 2006 (7,08%) turun menjadi 4,88% pada tahun 2010 (Anonim, 2010). Dalam rangka menuntaskan kemiskinan upaya pemberdayaan pedesaan menjadi mutlak untuk dilakukan salah satunya melalui Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi). Simantri dicanangkan sejak tahun 2009 sebagai salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali organik dan visi Bali MANDARA (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera).

Simantri adalah upaya terobosan dalam mempercepat adopsi alih teknologi pertanian kepada masyarakat pedesaan. Simantri mengintegrasikan kegiatan sektor pertanian dengan sektor pendukungnya sesuai potensi masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada. Inovasi teknologi yang diperkenalkan berorientasi untuk menghasilkan produk pertanian organik yang berorientasi pada pengembangan usaha pertanian tanpa limbah (*zero waste*) dan menghasilkan 4 F (*food, feed, fertilizer dan fuel*). Kegiatan utama adalah mengintegrasikan usaha budidaya tanaman dan ternak, dimana limbah tanaman diolah untuk pakan bermutu (makanan ternak) dan cadangan pakan pada musim kemarau dan limbah ternak (*faeces, urine*) diolah menjadi bio gas, bio urine, pupuk organik dan bio pestisida.

Kondisi dan permasalahan dalam pembangunan usaha pertanian di pedesaan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : (1) belum tergarapnya potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara optimal; (2) belum berkembangnya diversifikasi usaha, baik internsektor pertanian dan antar sektor pertanian dengan sektor lainnya sesuai potensi masing-masing wilayah; (3) belum terfokus dan terpadunya kegiatan baik antar sub sektor pertanian dan dengan sektor pendukungnya; (4) masih rendahnya insentif berusaha karena belum diterapkannya rekomendasi teknologi dan sistem usahatani yang terintegrasi, efektif dan efisien (Wisnuardhana, 2010).

Program simantri diprogramkan oleh Pemda Bali dalam rangka untuk menjaga alam Bali agar tetap subur dan sedikit pencemar kimia dalam tanah dan tujuan akhir untuk mengembangkan kelompok simantri untuk kesejahteraan petani anggota. Untuk selanjutnya diharapkan bisa menghasilkan produk yang berkelanjutan, sehingga selanjutnya akan muncul pertanyaan yang berkaitan dengan peranan modal social penyelamatan alam Bali dari pencemar lingkungan. Oleh sebab itu maka dipandang perlu untuk mengkaji modal social yang dalam pengembangan kelompok simantri untuk pemberdayaan petani di Bali.

1.2 Permasalahan

Bagaimana modal sosial dalam pengembangan simantri dalam pemberdayaan petani di Bali.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui modal social dalam pengembangan simantri dalam pemberdayaan petani di Bali.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apa itu Modal Sosial?

Putnam (2000) berpendapat bahwa modal sosial kuat, bahkan dampaknya dapat diukur pada aspek yang berbeda dari kehidupan kita dan itu lebih dari “sekedar hangat, perasaan suka saat di sayangi atau kebanggaan masyarakat”. Efek ini terukur mencakup tingkat kriminalitas rendah (Halpern 1999, Putnam 2000), kesehatan yang lebih baik (Wilkinson, 1996), meningkatkan umur panjang (Putnam, 2000) lebih baik pencapaian pendidikan (Coleman, 1988), lebih besar tingkat kesetaraan penghasilan (Wilkinson 1996, Kawa-chi et al 1997.), peningkatan kesejahteraan anak dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak (Cote dan Healy, 2001), pemerintah kurang korup dan lebih efektif (Putnam, 1995) dan prestasi ekonomi ditingkatkan melalui kepercayaan meningkat dan lebih rendah biaya transaksi (Fukuyama, 1995).

Modal sosial umumnya dianggap sebagai atribut masyarakat, sedangkan modal manusia adalah dianggap sebagai atribut individu dan terdiri dari keterampilan, kualifikasi dan pengetahuan. Namun Gould (2001) menganggap modal budaya sebagai bentuk modal sosial, artinya ketika sebuah komunitas berkumpul untuk ber-bagi budaya, (melalui perayaan, ritual dan dialog antar budaya), adalah meningkatkan hubungan tersebut, ke-mitraan dan jaringan (modal sosial). Modal sosial adalah produktif tetapi bisa habis jika tidak diperpanjang. Selain itu, Putnam juga menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang bekerja sama modal sosial akan lebih banyak diproduksi dan orang-orang yang kurang bekerja sama dengan komunitas maka modal sosial akan terkuras. Putnam (2000) juga mencatat bahwa modal manusia adalah orang perseorangan sedangkan, modal sosial mengacu pada hubungan antara individu dan jaringan sosial dan norma timbal balik yang muncul dari mereka.

“Modal sosial didefinisikan berdasarkan fungsinya, itu bukan entitas tunggal, tapi berbagai entitas yang berbeda dan memiliki karakteristik yang sama: mereka semua terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan mereka memfasilitasi tindakan individu tertentu yang berada dalam struktur “ (Coleman 1990:302). Menurut Coleman, modal sosial dapat mengambil tiga bentuk, pertama kewajiban dan harapan yang tergantung pada rasa percaya (*trust*) dari lingkungan sosial, kedua kapasitas informasi mengalir melalui struktur sosial dalam rangka memberikan dasar bagi tindakan dan ketiga adanya norma-norma disertai dengan sanksi yang efektif.

Fukuyama (1995) paling kenal dengan modal sosial dan rasa percaya dan bekerja dalam kerangka ekonomi, ketimbang dari sisi sosiologis seperti Coleman atau perspektif ilmu politik seperti Putnam. Passey (2000) menunjukkan bahwa Fukuyama mencoba untuk membandingkan kinerja ekonomi dari beberapa bangsa dan budaya yang berbeda berdasarkan tingkat rasa percaya yang berbeda. Ini adalah tingkat rasa percaya yang melekat dalam suatu masyarakat tertentu bahwa kondisi kesejahteraan dan tingkat demokrasi, serta kemampuannya untuk bersaing secara ekonomi.

Bank Dunia dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) juga mendefinisikan modal sosial sebagai “jaringan bersama dengan norma-norma bersama, nilai-nilai dan pemahaman yang memfasilitasi kerjasama dalam atau di antara kelompok-kelompok “(Cote dan Healy, 2001:41). Bank Dunia yang lebih luas dan menyarankan: “Modal sosial mengacu pada institusi, hubungan, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial suatu masyarakat”. Modal sosial tidak hanya merupakan jumlah dari lembaga yang mendukung masyarakat . Modal sosial adalah lem/alat perekat yang memegang mereka bersama-sama “ Bank Dunia berkomentar tentang perbedaan antara definisi yang sempit dan luas. Yang pertama dianggap sebagai satu set asosiasi horisontal antara orang-orang, yang terdiri dari jaringan sosial dan terkait norma-norma yang berpengaruh terhadap produktivitas masyarakat dan kesejahteraan. Yang terakhir menghitung kedua aspek-aspek positif dan negatif dengan melihat asosiasi vertikal antara orang-orang seperti contoh orang-orang di tempat kerja.

2.2 Peran Modal Sosial dalam Pembangunan

Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan modal ekonomi (finansial). Telah banyak studi yang menunjukkan bahwa pembangunan tidak saja didorong oleh faktor ketersediaan sumberdaya alam, besarnya modal finansial atau tingginya investasi ekonomi dan industrialisasi. Pembangunan bertautan dengan matra sosial, khususnya modal sosial. Dalam bukunya yang terkenal, *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity* (1995), Fukuyama berhasil meyakinkan bahwa modal sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara. Negara-negara yang dikategorikan sebagai high trust societies, menurut Fukuyama, cenderung memiliki keberhasilan ekonomi yang mengagumkan. Sebaliknya, low trust societies cenderung memiliki kemajuan dan perilaku ekonomi yang lebih lamban dan inferior.

Fukuyama (1995; 1999) mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka. Kunci dari modal sosial adalah trust atau kepercayaan. Dengan trust, lanjut Fukuyama, orang-orang bisa bekerjasama dengan baik. Karena ada kesediaan diantara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Trust bagaikan energi yang dapat membuat kelompok masyarakat atau organisasi dapat bertahan. Trust yang rendah mengakibatkan banyak energi terbuang karena dipergunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan.

Dalam radius *trust*, setiap masyarakat memiliki persediaan modal sosial yang berbeda-beda: seberapa jauh jangkaun moral kerjasama, seperti kejujuran, solidaritas, pemenuhan kewajiban dan rasa keadilan. Apakah modal sosial bersifat eksklusif (hanya berlaku untuk keluarga atau kelompoknya saja), atau bersifat inklusif (berlaku bagi kelompok lain yang lebih luas) juga berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Kelompok Ku Klux Klan atau Mafia, umpamanya, memiliki tingkat kohesi yang tinggi berdasarkan norma-norma yang disepakati bersama. Meski demikian, modal sosial mereka cenderung bersifat destruktif bagi masyarakat yang lebih luas.

James Coleman mengartikan modal sosial (*'social capital'*) sebagai struktur hubungan antar individu-individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Selanjutnya dikembangkan oleh Elionor Ostrom dalam mengkaji proyek-proyek pembangunan di dunia ketiga yang menyatakan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa eksistensi modal sosial terlihat dari kemampuan suatu komunitas merajut pranata yang menjadi acuan dalam bertindak. Pranata (institution) adalah seperangkat aturan yang berlaku dan digunakan dan dijadikan sebagai acuan untuk bertindak (Lubis, 1999).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua kelompok masyarakat memiliki sejumlah modal sosial karena modal sosial tercipta dari dinamika budaya masing-masing. Bila dikaitkan dengan proses pembangunan menjadi sangat penting karena selain berbasis masyarakat (partisipatif) juga mampu menciptakan nilai dan aturan-aturan baru dalam rangka pemenuhan berbagai aspek kebutuhan penduduknya.

Hasil-hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan sosial membuktikan bahwa berbagai modal sosial se-benarnya kondusif dengan pembangunan. Malah kalau dikaji lebih jauh dan dipahami dapat dijadikan modal untuk pembangunan itu sendiri, karena pembangunan sebenarnya bukan harus sesuatu yang baru tapi dapat mengacu kepada potensi lokal yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu contoh konkrit modal sosial terdapat pada masyarakat Mandailing di Tapanuli Selatan yang disebut Lubuk Larangan. Lubuk larangan adalah suatu modal sosial dengan penetapan daerah aliran sungai tertentu menjadi area terlarang bagi setiap orang untuk mem-peroleh dan memanfaatkan sumber daya ikan sebelum tiba waktu panen yang telah disepakati. Di dalamnya terdapat suatu pranata atau aturan lokal (komunitas) yang disepakati bersama untuk tidak mengganggu daerah aliran sungai tertentu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhan biota ikan dalam jangka waktu tertentu (1-2 tahun). Begitu tiba waktu yang disepakati, penangkapan ikan (panen) dapat dilakukan secara bersama dengan mekanisme aturan tertentu, seperti menjual karcis (tiket) dengan harga yang bervariasi sesuai dengan alat tangkap yang digunakan oleh peserta untuk penangkapan ikan. Dana hasil penjualan tiket selanjutnya digunakan untuk pembangunan desa (kepentingan bersama), seperti : pembangunan Masjid, Jalan desa, Guru mengaji, menyantuni anak yatim piatu dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

Contoh modal sosial lain yang berfungsi ekologis dikenal oleh masyarakat Bali yang disebut Awig-awig. Awig-awig adalah suatu bentuk hukum tertulis yang memuat seperangkat aturan yang disepakati dan di-jadikan acuan perilaku dan disertai sanksi-sanksi yang dilaksanakan secara tegas dan nyata dalam rangka pelestarian hutan. Aturannya mencakup : penebangan pohon dapat dilakukan bila seijin desa dengan umur pohon sekitar 40 tahun, mengatur jenis tanaman yang dapat ditanam, mengatur jenis pohon yang dapat ditebang, mengatur jenis buah yang dapat dipetik langsung dari pohon, mengatur cara memelihara ternak dan sebagainya. Semua aturan dan sanksi dalam awig-awig tersebut dapat mengatur pemanfaatan dan hubungan yang seimbang dengan alam (hutan) (Dharmika, 1992: 17-18).

II METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah dengan metode kepustakaan yang bersumber dari beberapa jurnal yang di publikasikan serta makalah atau tulisan ilmiah dan wawancara mendalam dengan responden pendamping simantri.

IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi)

Keberpihakan pada alam dan pertanian, dimulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakatnya dengan mendorong pertumbuhan di berbagai sektor. Khusus dalam peningkatan daya saing pertanian, Pemprov Bali memosisikannya sebagai prioritas pembangunan ke-4 dari tujuh program strategis yang dirancang. Salah satu terobosan yang digaungkan dalam bidang ini adalah Simantri yakni sistem pertanian terintegrasi. Sasaran program ini adalah pemberdayaan potensi pertanian secara terpadu dengan target terjadinya peningkatan pendapatan petani. Tak hanya itu, Simantri juga diyakini memiliki kolerasi yang sangat jelas dalam menuju Bali bersih dan hijau (*Bali Clean and Green*). Simantri memberikan efek domino terhadap berkembangnya sektor pertanian dan pariwisata secara berdampingan dan harmonis. Bahkan belakangan ini Simantri telah menjadi bagian dari objek wisata yang dikoordinasikan oleh ASITA. Tidak semua gapoktan beruntung mempunyai akses pariwisata, namun ada juga yang sama sekali tidak mempunyai akses dikunjungi oleh wisatawan.

Pola-pola kemitraan dalam Simantri pengelolaan hasil produksi di sektor pertanian dalam arti luas bisa membuka peluang usaha baru di sektor pertanian. Program simantri merupakan salah satu upaya terobosan untuk mempercepat adopsi alih teknologi pertanian kepada masyarakat pedesaan. Kegiatan utama simantri adalah mengintegrasikan kegiatan pertanian dan ternak, di mana limbah tanaman diolah untuk makanan ternak dan limbah ternak diolah menjadi biogas, biourine, pupuk organik dan biopestisida. Indikator keberhasilannya akan tampak dari terciptanya lapangan pekerjaan melalui diversifikasi usaha pertanian dan industri rumah tangga, berkembangnya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha tani, berkembangnya pertanian organik, usaha ekonomi pedesaan. Simantri memiliki korelasi yang amat jelas dalam penyelamatan alam Bali. Setidaknya untuk menyelamatkan sumber daya air dan kualitas lingkungan, bertahannya pertanian akan memberikan jaminan terjaganya ekologis alam Bali.

Kegiatan Simantri dilaksanakan sejak tahun 2009 sebanyak 10 unit dan dilanjutkan tahun 2010 sebanyak 40 unit, direncanakan akan dilaksanakan/ dikembangkan setiap tahun secara berkelanjutan (Wisnuardana, 2010). Kegiatan Simantri tahun 2009, dilaksanakan pada 10 lokasi Desa/Gapoktan (gabungan kelompok tani) di 7 Kabupaten (kecuali Denpasar dan Klungkung); di Kabupaten Buleleng (Musi, Telaga, Tajun dan Ambengan), Kabupaten Jembrana (Pengeragoan), Tabanan (Tunjuk), Badung (Pangsang), Gianyar (Buahan Kaja), Bangli (Belantih) dan Karangasem (Tulamben). Pembiayaan dari dana bantuan sosial (Bansos) anggaran perubahan APBD Provinsi tahun 2009 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (Lampiran 1).

Kegiatan Simantri tahun 2010, dilaksanakan pada 40 lokasi Desa/ Gapoktan di Kabupaten/Kota; Buleleng (Pendawa, Tigawasa, Bungkulun, Jagaraga, Sawan, Pejarakan, Subuk, Sumberkima, Tunjung, Tamblang, Klianget, Lokapaksa), Jembrana (Melaya, Banyubiru), Tabanan (Antap, Munduk Temu, Kelating, Mangesta), Badung (Pelaga), Denpasar (Kesiman), Gianyar (Taro, Blahbatuh), Bangli (Truyan, Songan A, Songan B, Jehem, Yang Api, Peninjoan), Klungkung (Batu Kandik, Gunaksa, Tusan), Karangasem (Datah, Ababi, Beban dem, Jungutan, Buana Giri, Sibetan, Tianyar Timur, Tianyar Barat, Ban). Pembiayaan dari dana Bantuan Sosial (Bansos) APBD Provinsi tahun 2010 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) (Dinas Pertanian Propinsi Bali, 2010). Dari 40 Gapoktan tersebut, terbanyak di Buleleng dan Karangasem. Wilayah terluas pertama dan kedua di Bali itu mendapat sentuhan Si-mantri paling banyak karena selama ini memiliki rumah tangga miskin (RTM) terbanyak pertama dan kedua. Hal ini sesuai dengan prioritas dari Simantri adalah menggarap desa dengan rumah tangga miskin di atas 35 persen. Pada tahun 2011, jumlah gapoktan yang dibantu melalui program simantri rencananya akan ditingkatkan jumlahnya menjadi 100 gapoktan.

Seperti diketahui bahwa masyarakat petani tersebut tidak hanya memiliki keterbatasan modal tetapi juga keterampilan. Dua keterbatasan ini dianggap menjadi kendala utama sulitnya petani keluar dari jerat kemiskinan. Program simantri bertujuan untuk mengatasi kedua hal tersebut sekaligus. Dengan kata lain program simantri bertujuan mengembangkan system pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam memberdayakan masyarakat petani dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka dan keluarganya sehingga mereka secara

mandiri dapat lepas dari lingkungan kemiskinan. Salah satu ruang lingkup simantri adalah mengembangkan anggotanya menjadi manusia yang berkualitas.

Syarat untuk mendapatkan simantri adalah rumah tangga miskin, setiap desa yang melaksanakan Simantri mesti memiliki komoditas unggulan sebagai titik ungkit. Sebagai contoh, Desa Tulamben di Karangasem digarap karena memiliki komoditas unggulan kacang mete dan kacang tanah. Di samping itu Gapoktan tersebut harus mau dan mampu melaksanakan program terintegrasi. Karakteristik petani Bali umumnya rata-rata kepemilikan lahan per kepala keluarga petani 0,3-0,5 ha dan rata-rata kepemilikan ternak sapi, babi dan kambing 2-5 ekor. Petani dengan penguasaan lahan dan ternak sedikit, bergabung dalam kelompok yang di sebut gapoktan, sehingga tak hanya gairah mereka berusaha tani semakin besar juga kehidupan mereka semakin membaik. Hal ini sesuai dengan sasaran Simantri meningkatkan luas tanam, peningkatan kuantitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan melalui peningkatan produksi pertanian dan populasi peternak. Selain itu akan selalu tersedia pupuk organik dan pestisida organik. Melalui gapoktan akan berkembang kelembagaan petani dan peningkatan kualitas sumber daya mereka sehingga diversifikasi usaha dan lapangan kerja di pedesaan semakin banyak. Jadi Simantri menggabungkan sejumlah kelompok tani apakah ternak, tani atau pengolahan hasilnya dalam suatu Gapoktan. Kegiatan utama yang digabungkan adalah integrasi tanaman dan ternak dengan kelengkapannya. Sebagai gambaran, Gapoktan Bina Karya Bakti Desa Musi, Gerokgak Buleleng mengembangkan populasi jagung 8 ha, kacang tanah 4 ha, pupuk organik 400 kgl, pengembangan sukun 200 pohon, sapi 20 ekor, kandang koloni 1 unit, instalasi biogas 1 unit, pengolahan pakan 1 unit, pengolahan kompos 1 unit serta instalasi biourine 1 unit.

Contoh lainnya adalah gapoktan yang mempunyai akses pariwisata yaitu satu kawasan yang menjadi proyek percontohan simantri adalah Kintamani, Kabupaten Bangli, tepatnya di Desa Catur dan Desa Blantih. Objek wisata simantri ini nantinya bisa melengkapi paket wisata yang selama ini dijual kepada wisatawan. Aksesibilitas dari dan menuju Desa Catur dan Blantih cukup memadai karena kondisi jalannya cukup bagus. Di areal proyek simantri yang merupakan kebun warga Desa Catur dan Blantih itu terdapat hamparan pohon kopi arabika dan pohon jeruk yang tumbuh subur dan mulai berbuah. Prinsip pengembangan objek wisata ini berpijak pada konsep pembangunan peduli lingkungan menuju Bali bersih dan hijau Pengembangan kopi dengan menggunakan pupuk organik di Desa Belantih, Kabupaten Bangli sudah mengantongi sertifikat organik.

Pengembangan program simantri tidak hanya bergantung pada dinamika dalam kelompok, tetapi juga pada keanekaragaman factor-faktor yang berada di luarnya. Faktor-faktor eksternal mencakup lingkungan fisik, aksesibilitas (daya jangkau) anggota, kekuatan pendampingan dan peranan pemda.

4.2 Modal Sosial Dalam Simantri

Masyarakat Bali yang sangat kental dengan tradisi sudah terbiasa dengan aktivitas berkelompok di dalam masyarakat seperti wadah desa adat, banjar, kelompok tani, koperasi tani dan lain-lain. Tujuan berkelompok bervariasi tergantung dari jenis kelompok tersebut. Terlepas dari perbedaan tujuannya yang jelas beber-apa anggota masyarakat ikut dalam kelompok dalam rangka kebutuhannya tersedia dalam kelompok. Ke-lompok simantri merupakan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang ada di desa seperti kelompok tani kopi, mente, kakao, kelompok ternak, kelompok perikanan dan lain-lain. Dalam perekrutannya gapoktan membuat proporsal kegiatan yang ingin di danai oleh program simantri. Dalam perencanaannya akan melibatkan ke-lompok tani tersebut. Terjadi kerjasama, diskusi dalam kegiatan pembuatan proposal yang akan diajukan untuk mendapatkan pendanaan. Selain itu anggota gapoktan juga akan mencari informasi kepada yang bisa mem-bantu membuat proposal yang benar dan memenuhi syarat untuk dibiayai. Untuk keperluan ini, jaringan antara anggota gapoktan dan pihak luar diperlukan agar menemukan orang yang tepat dan bisa membantu pembuatan proposal agar bisa dibiayai oleh program simantri.

Dalam implementasinya, kegiatan simantri adalah pengolahan kotoran ternak baik padat maupun cair menjadi pupuk dan biogas, sehingga gas methan yang bersumber dari kotoran ternak dan mencemari udara bisa di dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas untuk penerangan ataupun memasak. Jadi terjadi pengenalan teknologi pengolahan limbah kepada anggota kelompok. Terjadi nilai-nilai baru yang muncul akibat pengenalan teknologi mengolah limbah untuk mendayagunakan kotoran menjadi gas dan kalau tidak diolah akan merupakan pencemar methan dari kotoran sapi dan menguap ke udara yang menambah pemanasan global.

Pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak malah wajib diolah untuk mengurangi penguapan gas methan ke udara yang bisa meningkatkan pemanasan global. Seperti dalam laporan

PBB (FAO) yang ber-judul “*Livestock’s long shadow: Environmental issues and option*”, peternakan menyumbang paling besar gas rumah kaca kurang lebih sebesar 18%, angka ini melebihi besar gas rumah kaca yang di hasilkan oleh gabungan transportasi di seluruh dunia sebesar 13%. Selain itu peternakan juga melepaskan sebesar 9% karbon dioksida dan 37% gas metana. Selain itu limbah kotoran yang di hasilkan peternakan menyumbang 65% nitrooksida dan 64% ammonia yang menyebabkan hujan asam. Peternakan juga adalah penggerak utama dari peneban-gan hutan. Sebesar 70% bekas hutan di amazon telah di alih fungsikan menjadi ladang peternakan. Dampak dari penebangan hutan tersebut dalam setahun di perki-rakan menyumbangkan emisi sebesar 2,4 miliar ton gas CO₂ dalam setahun (Anonim, 2011). Selain mengurangi penguapan gas methan dan CO₂ ke udara, pengolahan limbah ternak akan menghasilkan pendapatan ganda yaitu, selain pupuk organik yang ramah lingkungan, juga menghasilkan bio gas yang bisa dipakai untuk penerangan, memasak dan menghangatkan ruangan.

Teknologi pengolahan limbah juga merupakan aset kelompok yang mengikat anggota untuk memanfaat-kannya dan memeliharanya. Tentu saja asset ini mem-pengaruhi perilaku anggota kelompok yang merupakan salah satu elemen modal social menurut Uphoff, 1999 dalam Lin, 1999.

Memproduksi produk berkelanjutan sebagai hasil dari pertanian berkelanjutan bisa meningkatkan pendapatan petani dengan mendapatkan harga premium. Apalagi produk ini bisa dilanjutkan menjadi produk organic dengan melalui sertifikasi organic. Dalam jangka panjang, program simantri diharapkan akan bisa menghasilkan produk organic. Permintaan produk organik di negara-negara maju meningkat pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan ini didorong oleh: (1) menguatnya kesadaran peduli lingkungan dan gaya hidup sehat masyarakat, (2) dukungan kebijakan pemerintah, (3) dukungan industri pengolahan pangan, (4) dukungan pasar modern (*supermarket* menyerap 50% produk organik), (5) harga yang tinggi di tingkat konsumen, (6) adanya label generik, dan (7) gencarnya kampanye nasional pertanian organik. Permintaan produk pertanian organik dunia mencapai 15-20% per tahun, namun pangsa pasar yang dapat terealisasi oleh Indonesia hanya 0,5-2%. Meskipun areal pertanian organik di Eropa terus bertambah, dari rata rata di bawah 1% tahun 1987 menjadi 2- 7% tahun 1997 (tertinggi di Austria mencapai 10,12%), penambahan tersebut tetap belum mampu memenuhi pesatnya permintaan (Wibowo, 2008). Permintaan untuk makanan organik tumbuh sebesar 15-25% per tahun di Kanada, segmen dengan pertumbuhan tercepat di industri makanan. Supply, terutama pasokan domestik, tidak mampu memenuhi permintaan dalam negerinya. Tingginya permintaan produk organik di negara maju mendorong negara berkembang untuk meningkatkan areal pengembangan dan produksi pertanian organik. Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan keanekaragaman hayati tropika dengan sumber daya alam yang beragam, Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan pertanian organik. Produk pertanian organik seperti sayuran diminati konsumen kelas menengah ke atas yang bersedia membayar lebih mahal untuk produk pangan yang sehat, aman, dan ramah lingkungan. Kalangan petani juga mulai muncul kesadaran untuk menerapkan praktek budi daya pertanian organik, karena alasan lingkungan, sosial ekonomi, kemandirian, dan kesehatan.

Pada tahun 2007 Departemen Pertanian resmi mengalokasikan anggaran sekitar US\$ 4 juta untuk pengembangan pertanian organik (Surono, 2007). Indonesia menargetkan untuk mengeksport 100 ribu ton beras organik. Namun, sejauh ini hanya mampu mengeksport sepersepuluh dari tujuan itu (10 ribu ton). Saat ini, ada 5 produsen organik populer dan peternakan di seluruh Indonesia. Namun menurut direktori pertanian organik yang diterbitkan oleh Departemen Pertanian, ada sekitar 49 perusahaan dan peternakan memproduksi produk-produk organik seperti beras, buah-buahan, teh sayuran, jamu, tanaman obat, dan produk susu, dan 41 perusahaan yang memproduksi pupuk organik dan pestisida.

Peluang pasar produk organik ini merupakan peluang bagi kelompok simantri untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa disertifikasi organic sehingga bisa mengisi pasar luar negeri yang belum bisa diisi oleh produsen organic di dunia. Disamping pasar export, pasar local Bali juga cukup menjanjikan. Kualitas sayuran yang diinginkan oleh hotel dan restoran di Bali adalah sayuran yang bebas kontaminasi kimia baik yang berasal dari pestisida, insektisida maupun dari pupuk kimia (Parining, 1999).

Penelitian internasional menunjukkan bahwa sistem pertanian organik biasanya lebih menguntungkan dibandingkan sistem pertanian non-organik. Hal ini karena, meskipun hasil yang sedikit lebih rendah (dalam beberapa kasus), biaya input akan sangat berkurang, sementara harga selalu lebih tinggi. Secara global, hasil tanaman organik rata-rata 10% di bawah sistem non-organik. Secara keseluruhan bisa dijelaskan bahwa hasil pertanian konvensional bervariasi antara sistem ekstensifikasi dan intensifikasi. Di Eropa, dimana produksi non-organik sangat intensif, hasil

sistem organik terlihat relatif lebih rendah dari pada sistem ekstensifikasi seperti yang ditemukan di Amerika Utara dan Australia. Di Amerika Utara dan Australia, hasil tanaman organik umumnya 20% lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian non organik. Di Eropa, berkisar 20-40% lebih rendah dengan non organik. Hasil panen dalam sistem organik terus meningkat sejalan dengan pemahaman petani dalam budidaya tanaman organik (MacRae, 1990).

Pendapatan juga bisa ditingkatkan dengan menurunkan biaya input dengan mengadopsi program simantri dalam bentuk memanfaatkan limbah yang ada di sekitar ladang pertanian dalam bentuk kotoran ternak dan limbah pohon di sekitarnya. Menurut Dalgaard, 2003 sistem organik menggunakan energi 65% lebih sedikit daripada yang konvensional. Hal utama yang menyebabkan perbedaan adalah dalam konsumsi bahan bakar fosil yang dikaitkan dengan bahan operasional, pestisida sintetis, pupuk dan bahan pakan impor.

Disamping terjadi pengenalan teknologi, terjadi per-luasan kerja sama antar kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan. Terjadi kerjasama lintas kelompok tani atau terjadi jaringan yang lebih luas dibandingkan sebelum program simantri di implementasikan. Penguatan modal social dalam bentuk perluasan jaringan akan bermanfaat dalam sharing informasi di bidang pertanian baik dalam produksi maupun pemasaran. Potensi konflik tentu saja akan muncul kalau penerapan program simantri tidak di implementasikan berdasarkan asas keadilan. Terjadi kecemburuan social bagi kelompok tani yang belum mendapatkan bantuan simantri. Pencetus simantri sudah mengantisipasi dengan mengharuskan gapoktan yang mau mendapatkan kucuran bantuan program harus mengajukan proposal aktivitas gapoktan. Terjadi seleksi dan bagi yang proposalnya memenuhi syarat kelulusan, maka akan mendapatkan bantuan.

V PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan dari uraian di atas adalah modal sosial dalam pengembangan program simantri berupa kerjasama, nilai dan jaringan yang diharapkan bisa menghasilkan produk pertanian yang ramah lingkungan yang permintaannya semakin lama semakin meningkat baik oleh konsumen luar negeri maupun konsumen hotel di Bali yang pada akhirnya bisa memberdayakan anggota simantri.

5.2 Saran

Bagi pemangku kebijakan agar bisa memperluas dan memperbanyak gapoktan yang bisa mendapatkan program simantri karena disamping bermanfaat dalam memberdayakan petani, juga akan mengurangi kecemburuan social antar gapoktan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010b. Simantri. Dinas Pertanian Propinsi Bali.
- Anonim, 2011. Kontribusi Peternakan Pemanasan Global. <http://blogs.unpad.ac.id/riskyadipradana/2011/03/04/kontribusi-peternakan-dalam-pemanasan-global/> Biala, Katarzyna and Michel Terres, Jean, Pointereau, Philippe, Luisa Paracchini, Maria Ed. 2007. Low Input Farming Systems: an Opportunity to Develop Sustainable Agriculture. Proceedings of the JRC Summer University, Ranco, 2-5 July 2007, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability.
- Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital *The American Journal of Sociology*, Vol. 94, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure. (1988), pp. S95-S120.
- Cox, David. 2004. "Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region" makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret
- Dalgaard, T. 2003. Energy Balance Comparison of Organic And Conventional. In: OECD (Ed.). *Organic Farming: Sustainability, Policies And Markets*. CABI Publishing, UK